

PENYUSUNAN PROTOTIPE INDEKS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PNPM INTI
(PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)

WAHYONO KUNTOHADI, BAGOES JOETARTO,
SILVIRA AYU ROSALIA DAN SYARIFUDIN PRAWIRO NAGORO

TNP2K WORKING PAPER 12 - 2014
Juli 2014

TNP2K **WORKING PAPER**

PENYUSUNAN PROTOTIPE INDEKS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PNPM INTI (PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)

**WAHYONO KUNTOHADI, BAGOES JOETARTO,
SILVIRA AYU ROSALIA DAN SYARIFUDIN PRAWIRO NAGORO**

TNP2K WORKING PAPER 12 - 2014
Juli 2014

Seri Kertas Kerja TNP2K menyajikan temuan-temuan dari pekerjaan yang sedang berjalan guna mendorong diskusi dan pertukaran ide-ide dalam bidang kemiskinan, perlindungan sosial dan isu-isu pembangunan.

Temuan, penafsiran dan kesimpulan dalam laporan ini merupakan pandangan penulis dan bukan mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Dukungan terhadap publikasi ini diberikan oleh Pemerintah Australia melalui Poverty Reduction Support Facility (PRSF).

Dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial.

Saran pengutipan: Kuntohadi, W., B. Joetarto, S. Ayu Rosalia dan S. Prawiro Nagoro. 2014. 'Penyusunan Prototipe Indeks Pemberdayaan Masyarakat untuk PNPM Inti (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)', *TNP2K Working Paper 12-2014*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jakarta, Indonesia.

Untuk meminta salinan laporan ini atau untuk keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silakan hubungi TNP2K Knowledge Management Unit (kmu@tnp2k.go.id). Laporan ini juga tersedia pada situs web TNP2K.

TNP2K
Grand Kebon Sirih Lt.4
Jl Kebon Sirih Raya No.35
Jakarta Pusat 10110
Tel: +62 (0)21 3912812
Fax: +62 (0)21 3912513
www.tnp2k.go.id

Penyusunan Prototipe Indeks Pemberdayaan Masyarakat untuk PNPM Inti (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)¹

Wahyono Kuntohadi*, Bagoes Joetarto, Silvira Ayu Rosalia, and Syarifudin Prawiro Nagoro²

Juli 2014

ABSTRAK

PNPM Inti adalah program nasional penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas masyarakat yang berjalan di Indonesia sejak tahun 2007. Sejauh ini program tersebut telah menggunakan banyak indikator kinerja berbasis pada output (hasil) untuk mengevaluasi program, tetapi tidak pernah menggunakan sebuah indeks yang secara efektif dapat menunjukkan kinerja proses pemberdayaan masyarakat.

Sebuah indeks yang efektif dibutuhkan secara signifikan dalam aktivitas monitoring dan evaluasi karena jumlah peserta yang sangat banyak, proses pemberdayaan yang bertahap, dan adanya jadwal yang ketat untuk melakukan inspeksi lapangan untuk validasi. Indeks tersebut dibangun dengan mempertimbangkan enam langkah proses pemberdayaan masyarakat dan tiga indikator utama. Terdapat beberapa tantangan yang cukup serius untuk mendapatkan solusinya, antara lain: (1) jumlah variabel pemberdayaan yang sangat banyak; (2) nilai variasi sebaran data yang sangat tinggi oleh karena keanekaragaman karakter wilayah dan (3) banyaknya nilai data missing dalam MIS sebagai hasil pengumpulan data.

Dengan menggunakan analisis faktor dan re-estimasi nilai pencilan, indeks kinerja dan indeks kelengkapan data disusun untuk menelusuri wilayah yang masih memiliki kinerja pemberdayaan yang rendah. Indeks tersebut diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat karena memiliki rentang nilai yang mudah untuk diinterpretasikan, efektif untuk menelusuri penyebab kinerja yang lemah, dan memiliki perbandingan kinerja diantara beberapa wilayah yang dipilih.

Kata kunci: *PNPM Inti, pemberdayaan masyarakat, analisis faktor, dashboard*

* Kontak: wahyono.kuntohadi@tnp2k.go.id atau wkuntohadi2000@gmail.com

¹ Metodologi pembuatan prototipe tersebut bisa digunakan pada implementasi UU Desa pasca 2014. Hal tersebut berkaitan dengan pembuatan indeks-indeks untuk tahapan pemberdayaan komunitas perdesaan—di bawah aktifitas pemantauan dan evaluasi—yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, meskipun aturan dari tahapan-tahapan pemberdayaan tersebut mungkin saja berbeda-beda antar kabupaten dalam satu provinsi.

² Wahyono Kuntohadi adalah data analis senior di tim Integrated-MIS Pokja Monev TNP2K. Bagoes Joetarto saat ini bekerja sebagai tenaga ahli spesialis Monev PNPM di Klaster 2 TNP2K. Silvira Ayu Rosalia adalah data analis junior di tim Integrated-MIS Pokja Monev TNP2K. Syarifudin Prawiro Nagoro bertindak sebagai konsultan data Monev di Pokja Klaster 2 TNP2K. Ucapan terimakasih ditujukan kepada kepada Suahazil Nazara, Aunur Rofiq Hadi dan Elan Satriawan untuk input maupun ulasannya dalam penyusunan kertas kerja. Ucapan terima kasih kepada Bimo Suhariyanto yang telah membantu mengedit naskah ini dan Purwa Rahmanto yang menyusun tata letak publikasi ini. Setiap kesalahan yang ada sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Daftar Isi

1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	3
3. Metode Penyusunan Prototipe.....	6
4. Pembelajaran.....	9
Referensi.....	10

Daftar Gambar

Gambar 1. Statistik Variasi Sebaran Data dari Variabel Asli PNPM Perkotaan.....	5
Gambar 2. Statistik Variasi Sebaran Data dari Variabel Asli PNPM Perdesaan	5

Daftar Tabel

Tabel 1. Tujuh Tahapan Pemberdayaan Masyarakat PNPM.....	2
Tabel 2. Tahapan Flow Pemberdayaan PNPM dan Statistiknya dari Variabel yang Diproses.....	3
Tabel 3. Flowchart untuk Menyusun Prototipe Indeks.....	6
Tabel 4. Hasil Reduksi Dimensi dengan Analisis Faktor	7
Tabel 5. Usulan Tindakan Lanjutan dari Aktivitas Monev.....	7

1. Latar Belakang

PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas di beberapa tingkatan masyarakat dan pemerintah daerah termasuk para pemangku kebijakan dan pembuat keputusan. Program tersebut berjalan di Indonesia sejak tahun 2007 dan terdiri dari dua program utama yaitu PNPM Perkotaan dan PNPM Perdesaan yang dikenal sebagai PNPM Inti.

Kesuksesan program PNPM tergantung pada keterlibatan dan partisipasi dari anggota masyarakat di setiap tahap pemberdayaan. Hal tersebut diharapkan dapat mengubah pola pikir dan meningkatkan kapasitas individu serta masyarakat, dalam kaitannya dengan masalah dan situasi kemiskinan yang ada. Selanjutnya, rencana kegiatan dan pelaksanaannya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Implementasi PNPM mencakup semua wilayah kecamatan di Indonesia. Pelaksanaannya didukung oleh konsultan nasional yang disebut NMC (*National Management Consultant*) dan para fasilitator di tingkat masyarakat. Dalam proses implementasi PNPM terdapat tiga komponen, yaitu: (1) pemberdayaan komunitas masyarakat, (2) peningkatan kapasitas pemerintah dan tokoh masyarakat lokal, dan (3) pendanaan langsung komunitas.

Komponen pemberdayaan komunitas masyarakat terdiri dari beberapa aktivitas untuk membangun kemandirian dan kesadaran kritis masyarakat yang mencakup pemetaan potensi masyarakat, permasalahan dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif masyarakat, pengorganisasian masyarakat, pemanfaatan sumber daya, monitoring atau pengawasan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Sementara pada sisi lainnya, komponen peningkatan kapasitas pemerintah dan tokoh masyarakat lokal adalah rangkaian dari beberapa aktivitas untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan tokoh masyarakat lokal atau kelompok pemerhati, sehingga mereka dapat menciptakan situasi kondusif dan bersinergi positif untuk masyarakat, khususnya untuk warga miskin agar mendapat penghidupan yang lebih layak. Sedangkan komponen pendanaan langsung adalah stimulan kemandirian bagi masyarakat untuk secara finansial mendukung rencana aktivitas mereka, khususnya aktivitas yang secara langsung mengarah pada masyarakat miskin.

Pada proses pemberdayaan masyarakat PNPM, terdapat tujuh tahapan yang populer dikenal sebagai siklus PNPM (Tabel 1), dimana setiap tahapan mempunyai tujuan dan sasaran yang masing-masing.

Tabel 1. Tujuh Tahapan Pemberdayaan Masyarakat PNPM

Flow	Tahapan Pemberdayaan PNPM
1	Sosialisasi awal dan musyawarah masyarakat
2	Mengenali kemiskinan
3	Pemetaan swadaya
4	Pengorganisasian masyarakat
5	Penyusunan rencana
6	Pelaksanaan kegiatan
7	Pemanfaatan dan pemeliharaan hasil

Sumber: Pedoman umum PNPM, Kemenko Kesra, 2007.

Sayangnya setiap tahapan dalam siklus PNPM tidak pernah menjadi bagian kuantitatif dari beberapa analisis maupun evaluasi kinerja PNPM. Kenyataannya hampir semua laporan kinerja, analisis tematik, bahkan analisis kuantitatif tentang kinerja PNPM menggunakan output akhir dari program yang lebih banyak mengulas fisik gedung, jalan, fasilitas pendidikan atau kesehatan, dan jarang yang membahas tentang proses pemberdayaan masyarakat.

Pada sisi lain, aktivitas monitoring dan evaluasi (monev) jelas merupakan bagian yang penting dari cerita sukses PNPM. Namun, meskipun NMC telah melakukan aktivitas monev dari tahun ke tahun, hal tersebut menjadi sulit dan kompleks karena penambahan jumlah peserta dan aktivitas dalam tahapan siklus PNPM.

Meskipun demikian, dalam sistem *database* PNPM telah terkumpul data-data kegiatan pemberdayaan. Secara umum data dapat terkumpul secara rutin sesuai jadwal kegiatan, tetapi ada juga yang tidak terlaksana, yaitu apabila kegiatannya mengalami penundaan sehingga datanya terpaksa dilaporkan dalam format akumulasi. Kondisi lapangan masyarakat yang bervariasi, perbedaan keahlian operator lapangan, dan perbedaan kualitas aplikasi *database* dan perangkat keras di beberapa wilayah merupakan sumber masalah bagi tim monev NMC untuk melakukan pekerjaan mereka. Aktivitas monev menjadi sulit untuk dilakukan karena data-data dimutakhirkan secara inkonsisten, dan hal ini sering kali membuat aktivitas monitoring lapangan terlambat padahal jadwal dalam setiap tahapan seharusnya ketat.

TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) mempunyai tugas untuk membantu NMC dalam melaksanakan aktivitas monev tanpa membebani mereka pekerjaan tambahan terkait dengan pengumpulan data rutin kegiatan dalam siklus PNPM. Setelah melakukan beberapa diskusi, membangun indeks proses pemberdayaan masyarakat berdasarkan tahapan siklus PNPM adalah satu pilihan yang bagus, karena dapat memberikan gambaran lengkap dari kinerja wilayah yang dapat digunakan untuk melacak kinerja buruk dari beberapa wilayah secara cepat. Kemudian, pengecekan lapangan dapat segera dilakukan terhadap wilayah-wilayah tersebut sebelum mereka menyelesaikan tahapan pemberdayaan berikutnya.

Makalah berisi metodologi perancangan prototipe indeks proses pemberdayaan masyarakat yang pertama disusun dalam sejarah PNPM. Karena PNPM Perkotaan dan PNPM Perdesaan memiliki aturan berbeda dalam pelaksanaan tahapan siklus PNPM, maka harus dibangun prototipe indeks dengan penyesuaian yang diperlukan masing-masing PNPM, namun secara umum indeks tersebut akan bekerja dalam langkah analisis yang sama.

2. Permasalahan

Sebuah indeks yang efektif secara signifikan dibutuhkan dalam aktivitas monev karena tingginya jumlah masyarakat yang berpartisipasi, tahapan proses pemberdayaan yang bertingkat, dan jadwal waktu ketat untuk melakukan pemeriksaan lapangan sebagai validasi.

Setelah dilakukan evaluasi pada arsip *database* yang berisi variabel-variabel kegiatan, diputuskan bahwa indeks dapat dibangun dengan mempertimbangkan enam tahapan proses pemberdayaan masyarakat (Tabel 2). Selanjutnya, pada upaya menemukan solusi telah ditemukan permasalahan serius, yaitu: (1) tingginya jumlah variabel, (2) tingginya nilai variasi sebaran data pada hampir semua variabel yang disebabkan oleh keragaman karakter wilayah, dan (3) banyaknya jumlah data *missing* (kosong) yang berhubungan dengan aplikasi transfer *database* pada saat pengumpulan data.

Sebelum proses seleksi variabel, terdapat sekitar 400 variabel untuk PNPM Perkotaan dan 600 variabel untuk PNPM Perdesaan, dimana situasi tersebut sangatlah kompleks dan menyulitkan upaya analisis. Akan tetapi setelah dipelajari, kenyataannya adalah terdapat beberapa periode pengembangan aplikasi *database* dengan menggunakan konsultan yang berbeda yang mengakibatkan munculnya duplikasi variabel kegiatan. Faktanya, jumlah variabel yang dipakai hanya berkisar 90 variabel untuk setiap PNPM. Setelah melalui proses pertimbangan dan pemilihan variabel secara berhati-hati dan melalui konsultasi dengan NMC, maka hanya dipilih aktivitas-aktivitas pemberdayaan yang relevan untuk dijadikan indeks, dan terutama yang memiliki skala ukur kuantitatif. Tabel 2 memberikan informasi tentang jumlah aktivitas terpilih pada setiap tahapan (kolom a) dan jumlah variabel orisinal (asli dari *database*) yang akan dimodelkan menjadi indeks (kolom b). Seluruhnya terdapat 14 aktivitas untuk PNPM Perkotaan dan 16 aktivitas untuk PNPM Perdesaan, 56 variabel asli untuk PNPM Perkotaan dan 60 untuk PNPM Perdesaan, dan ini menghasilkan 42 variabel indikator untuk indeks PNPM Perkotaan dan 44 untuk indeks PNPM Perdesaan.

Tabel 2. Tahapan Flow Pemberdayaan PNPM dan Statistiknya dari Variabel yang Diproses

Flow	Tahapan Pemberdayaan PNPM	PNPM Perkotaan			PNPM Perdesaan		
		a	b	c	a	b	c
1	Sosialisasi awal dan musyawarah masyarakat	1	4	3	2	8	6
2	Mengenali kemiskinan	1	4	3	1	4	3
3	Pemetaan swadaya	3	12	9	3	12	9
4	Pengorganisasian masyarakat	1	4	3	4	12	8
5	Penyusunan rencana	7	28	21	2	8	6
6	Pelaksanaan kegiatan	1	4	3	4	16	12
Total		14	56	42	16	60	44

a = jumlah aktivitas

b = jumlah variabel asli

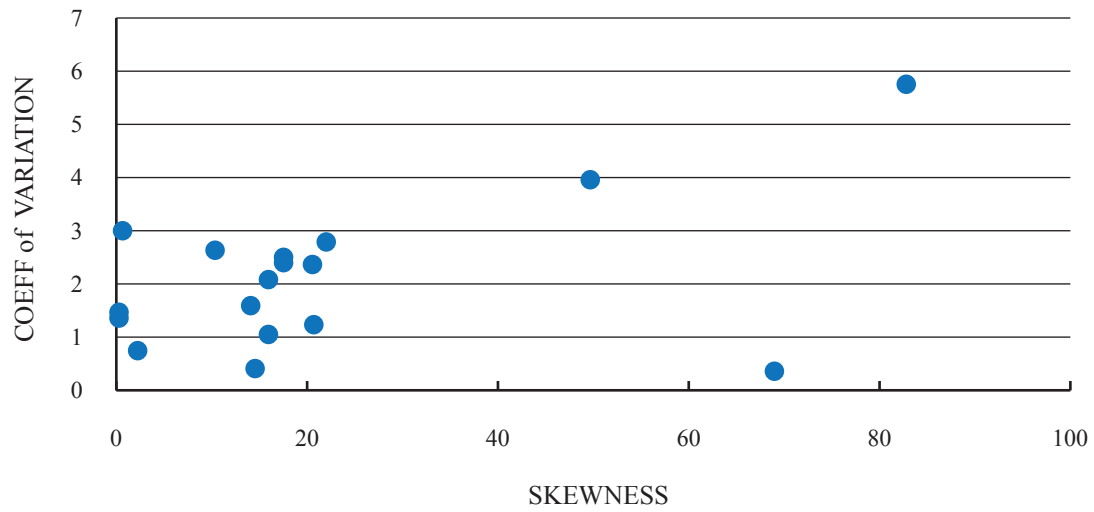
c = jumlah variabel indikator

Sumber : MIS NMC PNPM Perkotaan dan NMC PNPM Perdesaan, 2010-2012

Tingginya nilai variasi atau sebaran distribusi data dari variabel kegiatan adalah masalah lain yang harus diselesaikan dengan serius (Gambar 1 dan Gambar 2). Pada kedua program PNPM, nilai *skewness* (kemiringan data) sangatlah tinggi dan menyebabkan tingginya koefisien variasi. Nilai ideal dari *skewness* adalah 0 dan koefisien variasi adalah 1. Karena keduanya memiliki nilai yang tinggi hampir pada seluruh data, maka hal tersebut adalah situasi yang tidak ideal untuk analisis yang menggunakan pendekatan statistik, karena pendekatan statistik menggunakan asumsi data berdistribusi normal. Selain itu, tingginya nilai *skewness* mencerminkan risiko dari sebaran indeks yang dihasilkan. Indeks yang memiliki nilai rata-rata tinggi mungkin saja bisa dihasilkan, namun dengan situasi riil bahwa kebanyakan wilayah akan memiliki nilai indeks rendah. Hal tersebut terjadi karena terdapat data-data ekstrem di balik tingginya nilai *skewness*, dan data-data tersebut menyeret nilai rata-rata menjadi tinggi meskipun mayoritas data mungkin memiliki nilai indeks rendah. Hal ini berpotensi menciptakan “kebohongan” informasi, karena orang akan menyimpulkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki kinerja pemberdayaan masyarakat yang rendah, padahal situasi tersebut tercipta hanya karena beberapa titik ekstrem bernilai tinggi pada data.

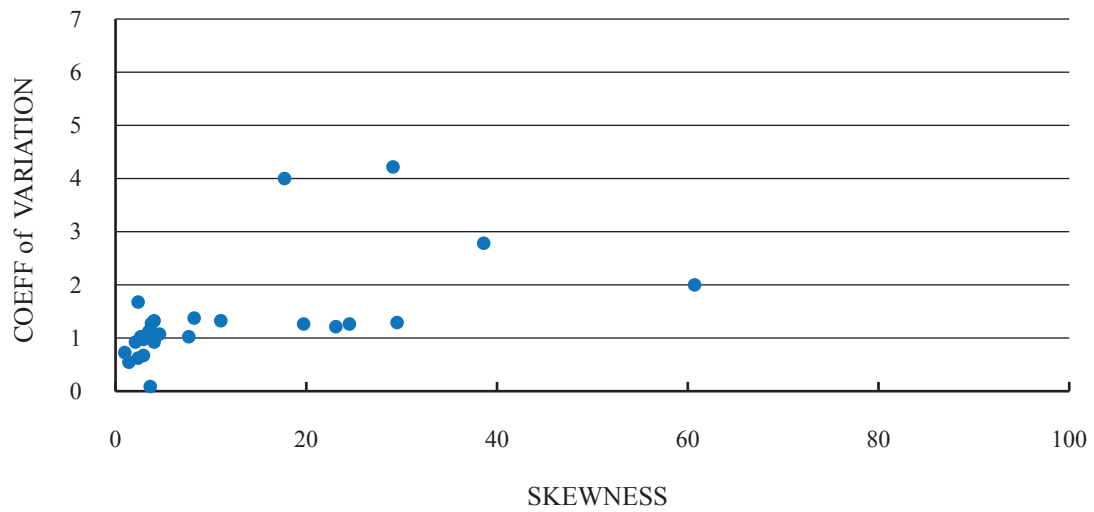
Data yang *missing* dapat menjadi masalah yang serius karena ini mencerminkan dua kondisi utama. Pertama, daerah tersebut tidak memiliki kegiatan yang dilakukan seperti kasus dalam siklus PNPM Perkotaan. PNPM Perkotaan menggunakan sistem “1-2-1-2-1 ..” tahun siklus, sedangkan PNPM Perdesaan menggunakan sistem “1-1-1 ...” atau kegiatan yang mirip setiap tahun. Nilai “2” berarti selama dua tahun “hanya ada kegiatan *review*”, dimana setiap kegiatan tidak harus dijalankan sebagaimana tahun “1”, misalnya tahapan rencana kegiatan yang hanya dilakukan di tahun “1” (pertama) dan tidak perlu dilakukan di dua tahun berikutnya. Kedua, operator lapangan daerah sering kali tidak disiplin dalam melakukan input data dari daerah. Kasus ini paling banyak terjadi di PNPM Perdesaan dibandingkan dengan PNPM Perkotaan. Masyarakat berbasis desa memiliki heterogenitas lebih tinggi yang berhubungan dengan kemampuan akses mereka, tingkat pendidikan, aktivitas hariannya yang mayoritas sebagai petani, dan keberadaan fasilitas umum untuk melangsungkan pertemuan. Permasalahan kekosongan data ini berpotensi memunculkan statistik yang salah. Sayangnya, re-estimasi nilai bukanlah hal yang dengan mudah dapat dilakukan karena ada kemungkinan jika datanya dilaporkan pada tahapan kegiatan selanjutnya dengan nilai yang telah diakumulasikan. Dengan demikian, konfirmasi ulang ke pelaksana lapangan mungkin menjadi langkah yang bijak untuk mendapatkan nilai data yang benar.

Gambar 1. Statistik Variasi Sebaran Data dari Variabel Asli PNPM Perkotaan



Sumber : MIS NMC PNPM Perkotaan, 2010-2012

Gambar 2. Statistik Variasi Sebaran Data dari Variabel Asli PNPM Perdesaan



Sumber: MIS NMC PNPM Perdesaan, 2010-2012

3. Metode Penyusunan Prototipe

Untuk menyusun prototipe indeks, terdapat beberapa aspek yang harus dilihat. Pertama, jumlah variabel harus disusutkan untuk menyederhanakan dimensinya yang disebut sebagai sub-indeks, sehingga akan sederhana pula interpretasinya. Kedua, terdapat suatu kebutuhan untuk mengklarifikasi setiap data, khususnya untuk data *missing* dan data dengan nilai yang sangat ekstrem, yaitu dengan proses *cleaning* (pembersihan) dan *cleansing* (merapikan distribusi data). Ketiga, harus ada sebuah mekanisme untuk melaporkan status variabel terkait dengan keberadaan data *missing*, karena situasi tersebut memengaruhi nilai skor indeks.

Langkah-langkah penyusunan indeks secara rinci dapat dilihat di Tabel 3. Langkah-langkah tersebut adalah langkah dasar untuk kedua program PNPM. Bagaimanapun juga, prototipe awal untuk PNPM Perkotaan adalah data tahun dengan kode “1” karena berisi tahap-tahap aktivitas pemberdayaan secara lengkap.

Tabel 3. Flowchart untuk Menyusun Prototipe Indeks

Awal	Proses	Selanjutnya
langkah - 1	Pengumpulan data asli	langkah - 1a
langkah - 1a	* <i>cleaning and cleansing</i> data	langkah- 2
langkah - 2	Penentuan dan perhitungan variabel indikator	langkah - 2a dan 3
langkah - 2a	* <i>menandai data missing</i>	langkah- 6
langkah - 3	Melakukan analisis faktor dan menghitung skor faktor	langkah- 4
langkah - 4	Perhitungan indeks faktor	langkah- 5
langkah - 5	Perhitungan indeks kinerja (PI) untuk setiap tahap	<i>Selesai</i>
langkah - 6	Perhitungan indeks kelengkapan data (CI) untuk setiap tahap	<i>Selesai</i>

Langkah ke-1 adalah proses mentransfer *database* NMC ke dalam *database* tim I-MIS TNP2K sekaligus menyesuaikan formatnya agar mudah dianalisis secara statistik. Dua kegiatan konsinyering telah dilakukan untuk memilih variabel dari aktivitas-aktivitas yang relevan sebagai penyusun indeks, serta menyusun beberapa perintah sql-server yang telah disesuaikan dengan *cohort* (tahun kepesertaan) PNPM.

Langkah-1a adalah bagian dari langkah ke-1. Klarifikasi data sekaligus proses *cleaning* data telah dilakukan dalam dua bulan oleh NMC dengan tujuan untuk mendapatkan data dengan tingkat validitas yang tinggi, sementara proses *cleansing* data adalah proses penentuan nilai batas data untuk melakukan re-estimasi data-data ekstrem. Tim monev NMC diberi wewenang penuh untuk penentuan langkah-langkah yang tepat dalam proses *cleaning* maupun *cleansing*. Dalam perjalanan proses tersebut, terjadi diskusi yang intensif, mendalam, namun memunculkan antusiasme yang tinggi, karena tak satu pun memiliki pengalaman sebelumnya untuk menyusun sebuah indeks pemberdayaan.

Langkah ke-2 adalah perumusan variabel indikator, yang dimunculkan dari variabel asli yang pada dasarnya terdiri dari: (1) jumlah pertemuan, (2) jumlah peserta, (3) jumlah peserta perempuan, dan (4) jumlah peserta orang miskin. Variabel indikator secara umum ditetapkan sebagai: (1) rata-rata

jumlah peserta per pertemuan, (2) persentase peserta perempuan per pertemuan, dan (3) persentase peserta orang miskin per pertemuan. Beberapa variabel indikator mungkin tidak relevan dikenakan pada beberapa kegiatan sehubungan dengan tujuan kegiatan tersebut, dan beberapa variabel indikator yang lain harus dinetralkan dengan memanfaatkan angka jumlah penduduk dewasa sebagai pembagi. Kesepakatan dalam hal ini telah dicapai antara tim analisis TNP2K dan tim money NMC.

Langkah-2a adalah bagian dari langkah ke-2, dimana langkah ini merupakan kegiatan penandaan data *missing* untuk diklarifikasi dengan pelaksanaan di lapangan, sebelum dilakukan re-estimasi atau harus dinyatakan sebagai *null* (data tidak relevan). Langkah ini berguna untuk perhitungan indeks tambahan yang dinamakan sebagai indeks kelengkapan data (langkah-6).

Langkah ke-3 adalah langkah penyusutan dimensi variabel melalui analisis faktor. Penghitungan statistik KMO (Kaiser-Meyer Olkin), persentase total variasi matriks data yang mampu dijelaskan oleh dimensi skor faktor, dan nilai *communality* akhir dari faktor yang terbentuk adalah ukuran-ukuran statistik terpenting dibalik proses penentuan jumlah dimensi faktor. Hasil faktorisasi dapat dilihat pada Tabel 4. Dibandingkan dengan Tabel 2 (kolom c), dimensinya telah dari 42 menjadi 17 untuk PNPM Perkotaan dan dari 44 menjadi 21 untuk PNPM Perdesaan. Sebagai hasil akhir langkah ini, didapat nilai skor dari faktor-faktor yang terbentuk yang merupakan komponen-komponen penghasil enam indeks untuk enam tahapan atau flow pemberdayaan (Tabel 2).

Langkah ke-4 adalah proses interpolasi skor faktor menjadi sebuah indeks dengan rentang nilai 0 sampai 100, sedangkan langkah ke-5 adalah proses perhitungan indeks untuk setiap *flow* dengan menggunakan persamaan linier dari skor faktor-faktor terkait. Nilai bobot untuk prototipe pertama ini adalah netral atau sama besar untuk setiap skor faktor dalam setiap *flow*, dimana nilai bobot ini diharapkan akan disesuaikan di kemudian hari oleh tim money NMC, setelah mereka menerapkan derajat pentingnya suatu indeks untuk evaluasi kinerja daerah. Indeks-indeks dalam enam flow tersebut dinamakan indeks kinerja (Performance Index-PI).

Sebagai pelengkap dari indeks kinerja (PI), dihitung pula indeks kelengkapan data (CI). Indeks ini mencerminkan mutu pengisian data dibalik skor indeks kinerja (PI). Rendahnya skor indeks kelengkapan data (CI) mengindikasikan adanya kewajiban beberapa daerah untuk meningkatkan proses pengumpulan data mereka. Karena CI dan PI saling terhubung, jika CI rendah maka skor indeks kinerja (PI) juga akan menjadi rendah.

Tabel 4. Hasil Reduksi Dimensi dengan Analisis Faktor

Flow	Tahap Pemberdayaan PNPM	PNPM Perkotaan	PNPM Perdesaan
1	Sosialisasi awal dan musyawarah masyarakat	2	3
2	Mengenali kemiskinan	2	2
3	Pemetaan swadaya	3	5
4	Pengorganisasian masyarakat	2	5
5	Penyusunan rencana	6	3
6	Pelaksanaan kegiatan	2	3
	Total	17	21

Sumber : MIS NMC PNPM Perkotaan dan NMC PNPM Perdesaan, 2010-2012. Data diolah dengan STATA.

Setelah skor CI dan PI dilengkapi, tim monev NMC dapat memilih tindakan inspeksi atau pemeriksaan berdasarkan dari hasilnya (Tabel 5). Skor CI yang rendah berpasangan dengan skor PI yang rendah mencerminkan kewajiban daerah untuk meningkatkan proses pengumpulan data yang disesuaikan dengan jadwal dari kegiatan-kegiatan di sepanjang tahapan pemberdayaan. Namun ketika skor CI tinggi, tim monev NMC memiliki kesempatan melakukan pemeriksaan pada daerah-daerah dengan skor PI rendah. Jika skor PI juga tinggi, yang berarti proses pemberdayaan suatu komunitas berjalan dengan baik, maka tim monev NMC tidak perlu melakukan tindakan inspeksi pada daerah tersebut, namun justru dapat melakukan analisis mendalam untuk mendapatkan informasi *lesson and learn* tentang bagaimana komunitas tersebut melakukannya. Tim monev NMC dapat pula menelusuri lebih dalam hingga ke angka skor faktor penyusun indeks sebuah *flow*, yang dapat mencerminkan variasi kinerja dari setiap aktivitas di dalam tahapan pemberdayaan. Jadi, perpaduan CI dan PI ini secara umum akan membantu tim monev NMC untuk secara efektif melakukan monitoring dan analisis terperinci di setiap daerah dan komunitas di setiap tahap pemberdayaan masyarakat.

Tabel 5. Usulan Tindakan Lanjutan dari Aktivitas Monev

Indeks Kelengkapan Data (CI)	Indeks Kinerja (PI)	Tindakan
<i>Buruk</i>	<i>Rendah</i>	Meningkatkan mutu pasokan data
<i>Baik</i>	<i>Rendah</i>	Pemeriksaan lapangan (<i>spotcheck</i>)
<i>Baik</i>	<i>Tinggi</i>	“Baik” –tidak ada tindakan inspeksi

Terlepas dari prototipe indeks yang dihasilkan, beberapa aspek penting harus diperhatikan. Pertama, prototipe yang menggunakan analisis faktor hanya dapat digunakan jika terdapat korelasi internal yang tinggi antar variabel, dan statistisi TNP2K harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk membuat setiap orang di dalam tim monev NMC memahami tentang metodologi penyusunan prototipe beserta risiko-risikonya dalam tataran cara penilaian kinerja daerah. Kedua, rentang nilai indeks 0-100 mencerminkan “perbandingan relatif” dari kinerja antar daerah, yang berarti skor indeks ini tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan output fisik berdasarkan indikator kinerja yang biasanya digunakan untuk memproduksi laporan PNPM. Ketiga, bagaimanapun juga, ada beberapa kesempatan untuk mengembangkan metodologi prototipe. Perbedaan tingkat kematangan daerah, kondisi demografis dan lokasi geografis, serta perbedaan tahun kepesertaan merupakan contoh-contoh sumber perbedaan karakteristik data yang berbeda yang dapat berpengaruh pada proses *cleansing* data dan analisis faktor.

Selain itu, untuk menajamkan tujuan pembuatan prototipe indeks sebagai alat penunjang aktivitas monev proses pemberdayaan PNPM, perlu untuk ditambahkan tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan (tahap 7) terkait dengan kesinambungan proses pemberdayaan PNPM. Kendala tidak dimasukkannya tahap 7 adalah karena datanya tidak mencukupi. Tetapi hal ini sebenarnya dapat ditanggulangi dengan hanya menggunakan indeks kelengkapan data. Hasil indeksnya dapat untuk mengkritisi pelaksana PNPM agar memberi perhatian pula pada aspek pemanfaatan dan pemeliharaan, karena kecenderungan yang terjadi di lapangan, adalah seolah berhentinya proses pemberdayaan pada tahap 6 yaitu pelaksanaan program. Tahap 7 proses pemberdayaan pada dasarnya merupakan tanda adanya kesinambungan proses dengan siklus tahun berikutnya, dan hal ini juga telah disepakati pada aktivitas pertemuan Musyawarah Desa Serah Terima. Kunci keberhasilan PNPM justru pada tahap 7, dimana setelah program PNPM tidak lagi berjalan, maka tim pemeliharaan yang akan melanjutkan.

4. Pembelajaran

Beberapa poin pembelajaran yang didapat selama kegiatan penyusunan prototipe indeks adalah sebagai berikut :

- Koordinasi yang melekat, intensif, dan berkesinambungan antara statistisi, konsultan ahli program PNPM, dan tim monev MNC merupakan suatu keharusan, khususnya untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai arti setiap statistik dan metode yang mendasarinya.
- Jadwal kegiatan pemberdayaan yang padat dan status serta mutu datanya merupakan hal yang sangat menentukan sebelum menetapkan format interpolasi untuk memproduksi indeks.
- Dibutuhkan tindakan segera pada tim manajemen *database* NMC untuk mendisiplinkan operator lapangan dalam pengumpulan data dan validasi nilainya.
- Terdapat kebutuhan untuk memiliki sebuah *dashboard* guna menampilkan indeks PI dan CI secara visual, sehingga tim monev NMC dapat dengan mudah mengakses dan meneliti kinerja daerah, baik dalam kinerjanya secara umum maupun secara terperinci.
- Terdapat kebutuhan untuk melakukan *benchmarking* (analisis perbandingan) kinerja dari satu daerah terhadap daerah lain yang secara umum skor indeks terburuk atau terbaik.
- Dalam pembuatan indeks PI perlu ditambahkan tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan (tahap 7) terkait dengan kesinambungan proses pemberdayaan PNPM.
- Penyusunan indeks PI dapat memberi masukan kepada pihak NMC tentang perlunya perbaikan mutu pasokan data dari lapangan karena akan memengaruhi proses penilaian kinerja pemberdayaan.
- Diharapkan indeks PI dapat digunakan untuk acuan alokasi anggaran dan analisis keterkaitan proses pemberdayaan dengan *outcome* program PNPM.

Referensi

Bennett, J., W. L. Briggs, and M. F. Triola. 2012. *Statistical Reasoning for Everyday Life, 4th edition*. USA: Pearson publisher.

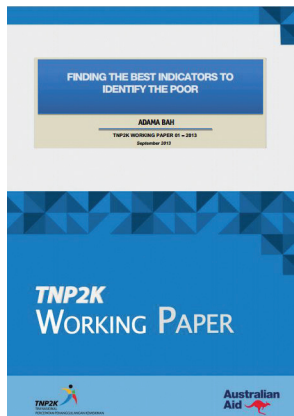
Hair, J. F., R. E. Anderson, R. L. Tatham, and B. C. William. 1998. *Multivariate Data Analysis*. USA: Prentice-Hall Inc.

Long, S. J. 2008. *The Workflow of Data Analysis Using Stata*. USA: Stata Press.

Sharma, S. 1996. *Applied Multivariate Techniques*. NY, USA: John Wiley & Sons publisher.

UNDP. 2011. *Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results*. New York , USA.

TNP2K Working Paper Series

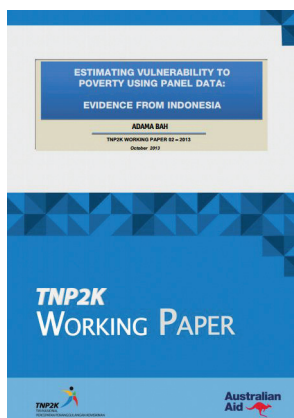


Working Paper 1

Finding the Best Indicators to Identify the Poor

Author : Adama Bah

Proxy-means testing (PMT) is a method used to assess household or individual welfare level based on a set of observable indicators. The accuracy, and therefore usefulness of PMT relies on the selection of indicators that produce accurate predictions of household welfare. In this paper the author proposes a method to identify indicators that are robustly and strongly correlated with household welfare, measured by per capita consumption. From an initial set of 340 candidate variables drawn from the Indonesian Family Life Survey, the author identifies the variables that contribute most significantly to model predictive performance and that are therefore desirable to be included in a PMT formula. These variables span the categories of household private asset holdings, access to basic domestic energy, education level, sanitation and housing. A comparison of the predictive performance of PMT formulas including 10, 20 and 30 of the best predictors of welfare shows that leads to recommending formulas with 20 predictors. Such parsimonious models have similar predictive performance as the PMT formulas currently used in Indonesia, although these latter are based on models of 32 variables on average.

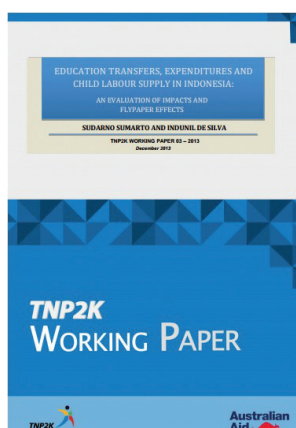


Working Paper 2

Estimating Vulnerability to Poverty using Panel Data: Evidence from Indonesia

Author : Adama Bah

Traditional poverty measures fail to indicate the degree of risk of becoming or remaining poor that households are confronted to. They can therefore be misleading in the context of implementing poverty reduction policies. In this paper the author proposes a method to estimate an index of ex ante vulnerability to poverty, defined as the probability of being poor in the (near) future given current observable characteristics, using panel data. This method relies on the estimation of the expected mean and variance of future consumption conditional on current consumption and observable characteristics. It generates a vulnerability index, or predicted probability of future poverty, which performs well in predicting future poverty, including out of sample. About 80% of households with a 2000 vulnerability index of 100% are actually poor in 2007. This approach provides information on the population groups that have a high probability of becoming or remaining poor in the future, whether currently poor or not. It is therefore useful to complement traditional poverty measures such as the poverty headcount, in particular for the design and planning of poverty reduction policies.

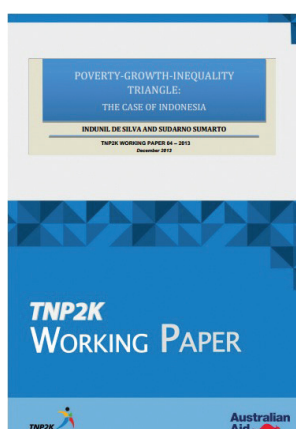


Working Paper 3

Education Transfer, Expenditures And Child Labour Supply in Indonesia: An Evaluation of Impacts And Flypaper Effects

Author : Sudarno Sumarto and Indunil De Silva

In this paper the authors investigate how the receipt of educational transfers, scholarships and related assistance programmes affects the labour supply of children and the marginal spending behaviour of households on children's educational goods. The authors use a nationally representative household survey of unusual scope and richness from Indonesia. They found strong evidence of educational cash transfers and related assistance programmes significantly decreasing the time spent by children on income-generating activities in Indonesia. Households receiving educational transfers, scholarships and assistance were also found to spend more at the margin on voluntary educational goods. These results were stronger on children living in poor families. The findings of this study lend support to the growing view in the literature that educational transfers, scholarships and related assistance can actually have a positive impact on economic development by increasing the level of investment in human capital. The results are particularly relevant for understanding the role of cash transfers and education assistance in middle-income countries, where enrolment rates are already at satisfactory levels, but the challenge is to keep post-primary students in school. Finally, the principal message that emerges from the study is: there are quantitatively non-negligible, average gains from educational transfers and support programmes on household education spending and child labour, especially for the poor.

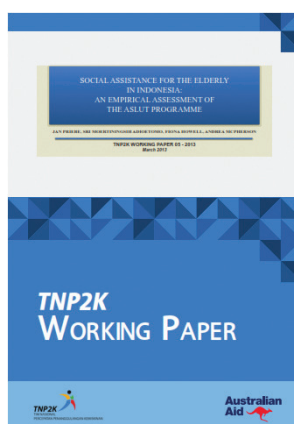


Working Paper 4

Poverty-Growth-Inequality Triangle: The Case of Indonesia

Author : Sudarno Sumarto and Indunil De Silva

This paper decomposes changes in poverty into growth and redistribution components, and employs several pro-poor growth concepts and indices to explore the growth, poverty and inequality nexus in Indonesia over the period 2002-2012. The authors find a 'trickle-down' situation, which the poor have received proportionately less benefits from growth than the non-poor. All pro-poor measures suggest that economic growth in Indonesia was particularly beneficial for those located at the top of the distribution. Regression-based decompositions suggest that variation in expenditure by education characteristics that persist after controlling for other factors to account for around two-fifths of total household expenditure inequality in Indonesia. If poverty reduction is one of the principal objectives of the Indonesian government, it is essential that policies designed to spur growth also take into account the possible impact of growth on inequality. These findings indicate the importance of a set of super pro-poor policies. Namely, policies that increase school enrolment and achievement, effective family planning programmes to reduce the birth rate and dependency load within poor households, facilitating urban-rural migration and labour mobility, connect leading and lagging regions and granting priorities for specific cohorts (such as children, elderly, illiterate, informal workers and agricultural households) in targeted interventions will serve to simultaneously stem rising inequality and accelerate the pace of economic growth and poverty reduction.



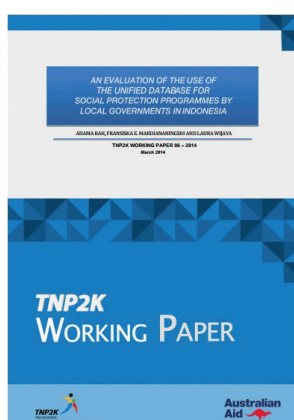
Working Paper 5

*Social Assistance for the Elderly in Indonesia: an Empirical Assessment of the ASLUT Programme**

Indonesia has undergone a demographic transition since the 1970s that has led to significant changes in the population age structure of the country. Life expectancy at birth increased from 45 years to 67 years. The number of elderly people aged 60 and above rose from about 5 million in 1970 to 18 million in 2010, and is projected to increase to over 71 million in 2050. The economic situation for many elderly persons is precarious. In 2011, 12 percent of older people were below the official poverty line. Older people, especially those in their 70s and those aged 80 and above, have the highest poverty rates among the population groups, 13.3 percent and 16 percent respectively. At the same time, a much greater proportion of the elderly population than officially classified as poor is vulnerable to falling into poverty. Moreover, many of the elderly suffer from poor health and have low literacy levels.

Currently, the coverage of the elderly with the existing formal pension schemes is very low. The Government of Indonesia (GOI) recognizes the gaps in the social insurance schemes and is explicitly taking actions to improve pension coverage. ASLUT, the current social assistance programme targeted directly at poor and neglected elderly, started in 2006 in six provinces reaching 2,500 beneficiaries. It has recently expanded to all 33 provinces and increased the number of recipients to 13,250 in 2011, and 26,500 beneficiaries in 2012. This paper explores the strengths and weaknesses of the coverage provided to the elderly and recommends that the ASLUT programme be developed further to meet the demographic challenges that Indonesia faces.

*This Working Paper will be republished in 2014

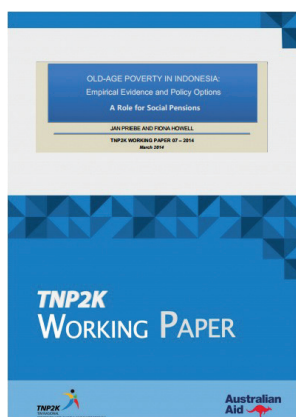


Working Paper 6

An Evaluation Of The Use Of The Unified Database For Social Protection Programmes By Local Governments In Indonesia

Author : Adama Bah, Fransiska E. Mardiananingsih and Laura Wijaya

The Unified Database for Social Protection Programmes (UDB) contains detailed socioeconomic and demographic information, as well as the names and addresses of the poorest 40 percent of the Indonesian population. Since 2012, the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), which manages the UDB, has provided this data to over 500 local government institutions to facilitate the implementation of local poverty reduction programmes. This paper evaluates the use of the UDB data based on the results of a qualitative assessment of data utilisation at the local level and a self-administered user feedback survey. To improve the cooperation with local governments for increased effectiveness of poverty reduction programmes, the authors' main recommendations are for TNP2K to engage more proactively with the institutions that request data, through (i) regular follow-ups with these institutions, (ii) a broad dissemination of socialisation material explaining the UDB, and (iii) the provision of specialised training on the use of UDB data for the planning and implementation of local programmes.

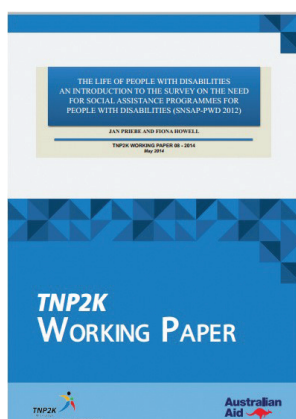


Working Paper 7

Old-Age Poverty in Indonesia: Empirical Evidence and Policy Options - A Role for Social Pensions

Author : Jan Priebe and Fiona Howell

Indonesia in 2013 is an ageing society with an elderly population (60+) of approximately 18 million or eight percent of the total population. Due to continuously low fertility levels, lower mortality and higher life expectancy rates, the number of elderly in the country is predicted to increase to more than 80 million individuals by 2050 who will by then constitute about 25 percent of the total population. Considering the rise in its elderly population and the low pension coverage, the Indonesian government has shown strong commitment towards raising the number of elderly who have access to formal pensions. In line with a variety of social welfare laws, the National Security Law (SJSN), declarations under ASEAN and commitments to a comprehensive social protection floor policy, Indonesia has endorsed a multi-pillar approach to providing income support in old age. However, the current reforms associated with the SJSN Law; aim only at providing income support to the future elderly generation - those working age adults that will retire in 15-40 years. While the success of these reforms needs to be demonstrated, there remains substantial scope to address the need for pension coverage among the current elderly population. Old-Age Poverty in Indonesia: Empirical Evidence and Policy Options – A Role for Social Pensions aims at filling several evidence gaps in the discussion on elderly and old-age poverty in Indonesia. Firstly it provides a detailed and comprehensive picture of the socio-economic circumstances of the current elderly generation. By doing so it provides Indonesia's first nationally representative poverty assessment on the elderly addressing aspects of education, health and remittances as well as poverty measurement. Second, the report outlines Indonesia's legal, political and programme commitments to alleviate old-age poverty and contrasts it with recent international experience on pension reform. This report discusses in particular the benefits of social pensions for Indonesia's elderly, and outlines the pros-and cons of poverty-targeted and universal pension schemes. Finally, the report provides ex-ante simulation results on the poverty and fiscal impacts for selected social pension schemes.

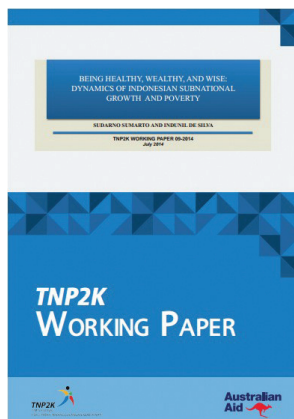


Working Paper 8

The Life of People with Disabilities: An Introduction to the Survey on the Need for Social Assistance Programmes for People with Disabilities

Author : Jan Priebe and Fiona Howell

In 2012, the Demographic Institute of the University of Indonesia conducted on behalf of TNP2K a unique survey on disability that sheds new light on the needs and living conditions of people with disabilities (PWDs) in Indonesia. This new dataset is called the Survey on the Need for Social Assistance Programmes for People with Disabilities (SNSAP-PWD 2012) and is available free of charge from TNP2K and PRSF. This paper provides an introduction into the SNSAP-PWD 2012 by describing its sampling design and the topics covered.

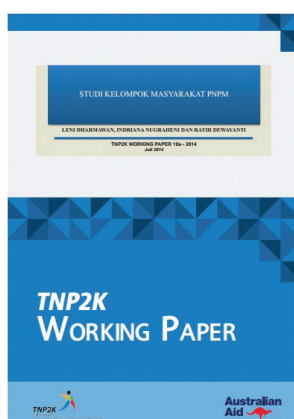


Working Paper 9

Being Healthy, Wealthy, and Wise: Dynamics of Indonesian Subnational Growth and Poverty

Author : Sudarno Sumarto and Indunil De Silva

The aim of this study is twofold. First, despite the vast empirical literature on testing the neoclassical model of economic growth using cross-country data, very few studies exist at the subnational level. The authors attempted to fill this gap by using panel data for 2002–12, a modified neoclassical growth equation, and a dynamic-panel estimator to investigate the effect of both health and education capital on economic growth and poverty at the district level in Indonesia. Second, although most existing cross-country studies tend to concentrate only on education as a measure of human capital, the authors expanded the analysis and probed the effects of health capital as well. To their knowledge, no study has done a direct and comprehensive examination of the impacts of health on growth and poverty at the subnational level. Thus, this study is the first at the subnational level, and the findings will be particularly relevant in understanding the role of both health and education capital in accelerating growth and poverty reduction efforts. The empirical findings are broadly encouraging. First, nullifying any doubts on the reliability of Indonesian subnational data, the results suggest that the neoclassical model augmented by both health and education capital provides a fairly good account of cross-district variation in economic growth and poverty in Indonesia. The authors found that the results on conditional convergence, physical capital investment rate, and population growth confirm the theoretical predictions of the augmented neoclassical model. They also found that both health and education capital had a relatively large and statistically significant positive effect on the growth rate of per capita income. Economic growth was found to play a vital role in reducing Indonesian poverty, reinforcing the importance of attaining higher rates of economic growth. Findings from the poverty–human capital model showed that districts with low levels of education are characterized by higher levels of poverty. Regions with mediocre immunization coverage and greater than average prevalence of waterborne diseases had higher poverty rates and lower output per capita. Similarly, regions with higher numbers of births attended by a skilled birth attendant were associated with lower poverty rates and higher economic output. The results in particular suggest that, in designing policies for growth, human development, and poverty reduction, it is necessary to broaden the concept of human capital to include health as well.



Working Paper 10a

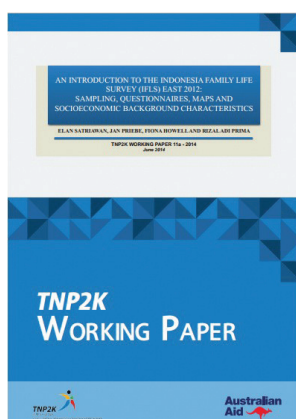
Studi Kelompok Masyarakat PNPM

Working Paper 10b

Lampiran Studi Kelompok Masyarakat PNPM

Author : Leni Dharmawan, Indriana Nugraheni dan Ratih Dewayanti, Siti Ruhanawati, Nelti Angraini

Studi Kelompok Masyarakat PNPM di lokasi terbatas—empat perdesaan dan dua perkotaan—memperlihatkan program berkinerja baik, namun penularan prinsip-prinsip dan proses PNPM di luar program ini sangat terbatas. Ada pengakuan akan keahlian individu pelaku dalam mengelola proyek sehingga mereka dilibatkan dalam berbagai proyek lain tetapi pengaruh mereka terbatas karena masing-masing proyek memiliki aturan main sendiri dan cenderung membentuk kelompok-kelompok baru—tidak memanfaatkan yang sudah ada. Sebagai proyek, bagi pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan tidak ada keharusan untuk mengikuti prinsip dan proses PNPM di luar PNPM. Fasilitasi tidak membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menuntut pemerintah desa/kelurahan melakukan hal yang sama, atau menyeimbangkan posisi warga kebanyakan relatif terhadap dominasi/kekuatan kelompok tertentu. Perlu ada integrasi kelompok-kelompok pelaku proyek ke dalam lembaga-lembaga desa yang reguler dan penyeimbangan kekuatan (checks and balances) untuk menghindari dominasi kelompok tertentu.

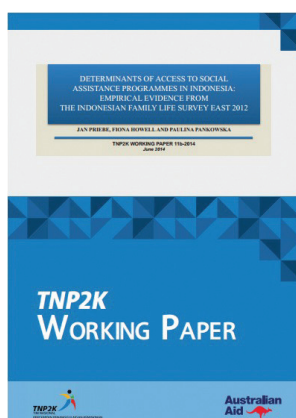


Working Paper 11a

An introduction to the Indonesia Family Life Survey IFLS east 2012 : Sampling Questionnaires Maps and Socioeconomic Background Characteristics

Author : Elan Satriawan, Jan Priebe, Fiona Howell and Rizal Adi Prima

The first round of the Indonesia Family Life Survey (IFLS) East was conducted in Eastern Indonesia in 2012. This paper is intended to provide researchers and policy makers alike an introduction to and brief overview of this new dataset. Topics covered include technical details of survey implementation (sampling procedure, calculation of weights, and field implementation) and a socioeconomic overview using Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik or BPS) data and IFLS East data of the provinces selected in the region.

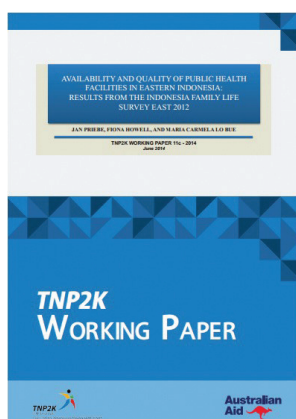


Working Paper 11b

Determinants of Access to Social Assistance Programmes in Indonesia Empirical Evidence from the Indonesian Family Life Survey East 2012

Author : Jan Priebe, Fiona Howell and Paulina Pankowska

In the past 15 years, the Government of Indonesia has implemented a variety of social assistance programmes intended to improve the lives of the poor and help them escape poverty. Many of these programmes are now operating at a national scale and cover millions of Indonesians. Using a new household survey dataset that covers the eastern areas of Indonesia (Indonesia Family Life Survey East 2012), this paper investigates the household-level determinants of access to social assistance programmes. The analysis reveals that social assistance programmes are relatively more available in poorer provinces and that poorer households—all things being equal—are more likely to access social assistance programmes than nonpoor households, which suggests that social assistance programmes in eastern Indonesia are successful in their efforts to target the poor (poverty targeting), both across regions and households. However, poverty targeting still has scope for improvement in terms of accuracy. Besides the poverty status (as measured in per capita consumption expenditures), the authors found that several other factors influence programme access. Having a disabled household member or having a household head who is a widow(er) appears to increase the likelihood of receiving social assistance programmes. Likewise, the level of trust and conflict in a community affects access to social assistance programmes. Particularly in the case of Raskin, the authors found that the programme is distributed more widely among those communities that are characterized by higher levels of conflict and lower levels of trust. The authors did not find that poor access to infrastructure and remoteness influences household access to social assistance programmes once they controlled for province fixed effects in the regression framework. Furthermore, the findings suggest that possession of a local ‘poverty letter’ strongly improves household access to social assistance programmes, even after controlling for a wide set of socioeconomic characteristics. In general, determinants of programme access differ significantly among provinces and between rural and urban areas.

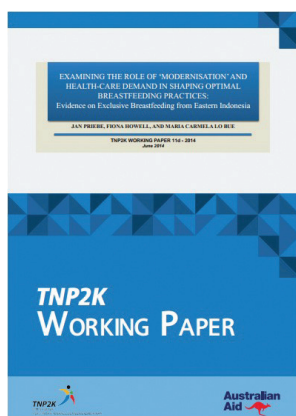


Working Paper 11c

Availability and Quality of Public Health Facilities in Eastern Indonesia : Results from the Indonesia Family Life Survey East 2012

Author: Jan Priebe, Fiona Howell and Maria Carmela Lo Bue

Little is known about public health-care supply in Eastern Indonesia, a region that shows worse health outcomes than the rest of the country. Drawing on a new dataset (IFLS East 2012), this paper examines the availability and quality of public health-care facilities (puskesmas and posyandu) in Eastern Indonesia. The findings suggest that public health-care supply plays a larger and more important role in Eastern Indonesia compared with Western Indonesia. However, this stronger reliance and dependence on public health-care provision has not necessarily resulted in quality health-care supply. Although significant improvements have been achieved over time, the authors found that many puskesmas and posyandu could benefit from more and better-trained staff (education, training, availability, absenteeism) and better physical endowment (infrastructure, medical equipment, and medications). The results further suggest that remarkable differences in the provision of health care exist between urban and rural areas; urban areas have on average better-equipped puskesmas, whereas rural areas seem to have better-equipped posyandu. Furthermore, the authors found that direct funds from the central level (central government funds and Jamkesmas), despite the decentralization process, play a major role in financing the operations of public health facilities. In rural Eastern Indonesia, these central-level funds constitute about 80 percent of the total operational budget of a puskesmas.



Working Paper 11d

Examining the Role of Modernisation and Healthcare Demand in Shaping Optimal Breastfeeding Practices: Evidence on Exclusive Breastfeeding from Eastern Indonesia

Author: Jan Priebe, Fiona Howell and Maria Carmela Lo Bue

The health benefits to mothers and children in adopting optimal breastfeeding practices are well recognized. However, despite many efforts to promote optimal breastfeeding practices in developing countries, only modest progress has been achieved in past decades. This paper attempts to fill several important research gaps on the socioeconomic determinants of optimal breastfeeding. In contrast to previous studies that have focused on the timely initiation and duration of breastfeeding, this article examines exclusive breastfeeding practices. Using a new data set from Eastern Indonesia, the authors revisited the 'modernisation' hypothesis and, as a first study in this field, investigated to what extent health-care demand and supply factors influence optimal breastfeeding behaviours. Controlling for a wide range of individual, household, and community characteristics, the findings suggest that mothers' labour market participation under 'modern' employment contracts negatively affects optimal exclusive breastfeeding practices, and hence provide support for the 'modernisation' hypothesis. Moreover, the results indicate that a higher availability and quality of health-care supply does not necessarily lead to better breastfeeding practices. Only when health-care supply was matched with a significant demand for such services, did the authors observe a higher chance for optimal exclusive breastfeeding.

PNPM Inti adalah program nasional penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas masyarakat yang berjalan di Indonesia sejak tahun 2007. Sejauh ini program tersebut telah menggunakan banyak indikator kinerja berbasis pada output (hasil) untuk mengevaluasi program, tetapi tidak pernah menggunakan sebuah indeks yang secara efektif dapat menunjukkan kinerja proses pemberdayaan masyarakat.

Sebuah indeks yang efektif dibutuhkan secara signifikan dalam aktivitas monitoring dan evaluasi karena jumlah peserta yang sangat banyak, proses pemberdayaan yang bertahap, dan adanya jadwal yang ketat untuk melakukan inspeksi lapangan untuk validasi. Indeks tersebut dibangun dengan mempertimbangkan enam langkah proses pemberdayaan masyarakat dan tiga indikator utama. Terdapat beberapa tantangan yang cukup serius untuk mendapatkan solusinya, antara lain: (1) jumlah variabel pemberdayaan yang sangat banyak; (2) nilai variasi sebaran data yang sangat tinggi oleh karena keanekaragaman karakter wilayah dan (3) banyaknya nilai data missing dalam MIS sebagai hasil pengumpulan data.

Dengan menggunakan analisis faktor dan re-estimasi nilai pencilaan, indeks kinerja dan indeks kelengkapan data disusun untuk menelusuri wilayah yang masih memiliki kinerja pemberdayaan yang rendah. Indeks tersebut diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat karena memiliki rentang nilai yang mudah untuk diinterpretasikan, efektif untuk menelusuri penyebab kinerja yang lemah, dan memiliki perbandingan kinerja diantara beberapa wilayah yang dipilih.

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Jl. Kebon Sirih No. 35, Jakarta Pusat 10110

Tel: +62 (0) 21 391 2812

Fax: +62 (0) 21 391 2511

E-mail: info@tnp2k.go.id

Web: www.tnp2k.go.id



Printed on recycled paper

ISBN 9786022751205



9 786022 751205